

# **MEREDUPNYA DEMOKRASI DI INDONESIA**

Diskusi Publik Saiful Mujani Research and Consulting  
(SMRC)

Benarkah ada kemunduran demokrasi di Indonesia? Apa tanda-tandanya? Mengapa kemunduran itu terjadi? Apa yang harus dilakukan untuk mencegah kemunduran demokrasi di Indonesia?

Pertanyaan-pertanyaan ini penting diajukan mengingat sejumlah ilmuwan politik terkemuka dari berbagai universitas ternama dunia yang tergabung dalam Comparative National Election Project (CNEP) melakukan evaluasi kualitas demokrasi di negara-negara demokratis, termasuk di Indonesia. Kesimpulan utama evaluasi mereka adalah ditemukan tanda-tanda pelemahan demokrasi di semua negara demokrasi, meskipun pelemahan tersebut belum menjadi fenomena yang merata.

Untuk mengidentifikasi tanda-tanda pelemahan demokrasi di Indonesia, Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyelenggarakan diskusi publik bertajuk “Meredupnya Demokrasi di Indonesia” pada Minggu, 4 Agustus 2019, di kantor SMRC, Jakarta.

Ada tiga ahli yang menjadi pembicara dalam diskusi ini, yaitu Saiful Mujani (Pendiri SMRC sekaligus anggota CNEP), Abdul Malik Gismar (Senior Lecturer Paramadina Graduate School), dan Mochtar Pabottingi (Peneliti Utama Bidang Politik LIPI).

Diskusi ini adalah bagian dari komitmen SMRC untuk mengembangkan proses demokratisasi di Indonesia sekaligus mendesiminasikan informasi yang dianggap penting bagi masyarakat agar memiliki informasi memadai saat berpartisipasi dalam proses politik.

Berikut transkrip jalannya diskusi, dari mulai presentasi masing-masing pembicara hingga sesi tanya-jawab.

## PRESENTASI

### Saiful Mujani (SM)

Dalam perdebatan politik mutakhir, ada pandangan tentang meredupnya demokrasi di dunia. Banyak pihak melihat, demokrasi di dunia agak melemah. Ini bahkan terjadi di negara-negara yang memiliki tradisi demokrasi yang kuat dan berusia panjang, seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Di daerah-daerah itu terjadi penurunan tingkat kedemokrasian. Misalnya saja, dari yang semula sangat toleran menjadi kurang toleran. Perkembangan ini terjadi di seluruh dunia. Menjadi semacam gejala global.

Ini juga terjadi di negara-negara yang sedang berusaha membangun demokrasi, seperti Indonesia dan banyak negara lain. Orang melihat ada gejala kemunduran, *set back* ke arah kembali menjadi negara otoriter atau semi otoriter. Kasus Filipina dan Thailand bisa dilihat sebagai contoh yang mengkhawatirkan. Bubar-bubaran. Sebaliknya, dugaan meredupnya demokrasi ini semakin diperkuat dengan kebangkitan negara- otoriter, seperti Republik Rakyat Cina (RRC) di panggung dunia. Mereka menjadi salah satu kekuatan baru. Ini semua memunculkan perasaan was-was dalam masyarakat dunia mengenai masa depan demokrasi. Ini pula yang perlu mendapat perhatian kita setelah kurang lebih selama dua dekade, sejak 1999, Indonesia menjalani proses demokratisasi.

Ada sejumlah cara untuk melihat perkembangan demokrasi di sebuah negara. Misalnya saja untuk melihat apakah demokrasi di sebuah negara maju, stagnan, atau mundur; kita bisa meminta pendapat warga yang merupakan aktor-aktor juga dalam demokrasi. Itu biasa dilakukan dalam survei-survei opini publik. Kami di SMRC cukup rutin melakukan survei opini publik seperti ini. Salah satu misal adalah survei SMRC tentang kondisi demokrasi di Indonesia, sesudah keramaian dan konflik terkait dengan pengumuman pilpres oleh KPU pada Mei 2019 lalu. Sebetulnya agak kebetulan. Kami memang merencanakan melakukan survei pada minggu-minggu terakhir Mei 2019, segera sesudah hasil penghitungan suara KPU diumumkan. Ternyata ada konflik. Jadi survei kami bisa turut merekam opini publik mengenai kondisi tersebut. Tapi yang terpenting, survei tersebut berusaha menangkap penilaian publik mengenai demokrasi di Indonesia.

Cara lain mengukur demokrasi di sebuah negara adalah dengan meminta penilaian dari para pengamat atau ahli di sebuah negara. Itu yang antara lain dilakukan dengan membuat Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang sekarang dijalankan Badan Pusat Statistik (BPS). Para ahli diminta memberi skor dan kemudian disiskusikan dalam sebuah *Focus Group Discussion* (FGD). Jadi memang lebih kualitatif. Dan Indonesia setiap tahun mengeluarkan Indeks tersebut.

Dalam pandangan saya, hal pokok yang menyebabkan sebuah negara bisa dinilai demokratis adalah tingkat kebebasan. Kebebasan adalah *the distinctive nature* dari demokrasi, yang membedakannya dari otoritarianisme, totalitarianism, sultanisme, atau kerajaan. Yang menjadi *nature* demokrasi bukanlah kesejahteraan ekonomi, pemerataan, keamanan, dan sebagainya. Yang menjadi pokok adalah kebebasan. Sebuah negara otoriter, yang mungkin saja setiap tahun melakukan pemilu dan memiliki partai politik dan mencapai tingkat ekonomi tinggi, tidak bisa dikatakan demokratis karena absennya kebebasan tersebut. Cina sekarang mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi tak bisa dikatakan negara demokratis. Begitu juga Singapura. Kondisi ekonominya baik dan melakukan pemilu, tapi tetap tidak akan dianggap sebagai negara demokratis karena rendahnya tingkat kebebasan di sana. Negara-negara Arab di sekitar teluk itu, kurang sejahtera apa rakyatnya? Tapi mereka tidak akan masuk dalam jajaran negara demokratis karena ketiadaan kebebasan.

Standar itu yang harus kita gunakan juga di Indonesia. Indonesia disebut mengalami kemajuan demokrasi karena kebebasan ini. Kita tidak mungkin melakukan diskusi semacam ini di era Orde Baru. Jadi saat ini kita mungkin miskin, tapi keren. Kita miskin, tapi lumayan berbudaya. Dan ini sudah tercapai selama 20 tahun.

Freedom House sejak tahun 1970-an sudah melakukan laporan tahunan tentang kondisi kebebasan di negara-negara di dunia. Salah satu negara yang dinilai adalah Indonesia. Jadi kita bisa melihat perkembangan demokrasi di Indonesia sejak Orde Baru. Nah, sekarang saya ingin mengajak kawan-kawan semua untuk memperhatikan kondisi demokrasi di Indonesia. Posisinya seperti apa?

Freedom House memiliki skor kebebasan 1-7. Angka 1 adalah yang paling bebas. Angka 7 adalah skor untuk sangat tidak bebas. Jadi ada tiga kelompok: skor 1-2 dianggap 'bebas penuh', skor 3-5 dianggap 'sebagian bebas', dan skor 6-7 dianggap 'tidak bebas'. Di tahun 1997, skor Indonesia berada di angka 6. Setelah reformasi 1998, angka Indonesia naik menjadi 4.

Skor kebebasan itu sendiri diukur berdasarkan dua aspek: *Political Rights* (PR, hak politik) dan *Civil Liberty* (CL, kebebasan sipil).

Dalam PR misalnya tercakup: terselenggaranya pemilihan kepala negara dan anggota parlemen secara demokratis dan adil, kehadiran lembaga pengawas pemilu yang independen, pluralisme politik (termasuk kebebasan warga untuk memperebutkan jabatan publik, kesamaan hak politik setiap warga, kehadiran oposisi yang berpeluang menang), transparansi kerja pemerintah, dan sebagainya.

Dalam CL misalnya tercakup: kebebasan berekspresi dan berkeyakinan, kebebasan pers, kebebasan beragama dan tidak beragama, kebebasan akademik, kebebasan berserikat, kebebasan organisasi buruh, pengadilan independen, supremasi hukum, kesetaraan di depan hukum, kebebasan berusaha, dan sebagainya.

Di Indonesia, proses kemajuan dalam hal PR nampak lebih cepat dari CL. Di Asia Tenggara, tingkat kebebasan dalam hal PR Indonesia adalah tertinggi di Asia Tenggara. Pada 2005, skor kita untuk PR mencapai 2. CL kita juga mengalami kemajuan, tapi tidak secepat PR. Pada 2005, Indonesia mengalami kemajuan CL: skornya naik dari 4 di tahun sebelumnya menjadi 3. Dalam penghitungan akhir, skor kebebasan Indonesia adalah  $2 (PR) + 3 (CL) = 2,5$ . Karena itulah Indonesia saat itu dimasukkan dalam kategori '*full free*'. Itu agak langka di Asia, apalagi di negara-negara yang mayoritas penduduknya muslim. Saat itu, dari 40-an negara muslim, hanya Indonesia dan Senegal yang masuk dalam kategori '*full free*'. Indonesia berada dalam kategori '*full free*' itu dari 2005 sampai 2012.

Sejak 2013, posisi Indonesia turun menjadi '*partly free*' kembali. Jadi ada penurunan sejak tujuh tahun terakhir. Ini yang perlu kita pelajari. Dalam hal PR, skor Indonesia tetap stagnan di angka 2. Sementara CL turun dari 3 menjadi 4. Mengapa ini terjadi?

Pertama, soal PR. Skor Indonesia tidak kunjung naik menjadi 1 karena masalah yang sangat fundamental yang harus diselesaikan. Yang paling utama adalah tidak berkembangnya *political pluralism*. Pluralisme politik kita dianggap masih mengandung kelemahan karena masih ada hak-hak politik kelompok tertentu yang didiskriminasi. Dalam argumen kebebasan, warga negara dengan latar belakang fisik,

agama, ras, atau etnik apapun seharusnya memiliki hak politik yang sama. Selama sama-sama manusia, ya harus diperlakukan sebagai manusia.

Di Indonesia, soal kesamaan itu masih menjadi masalah. Warga dengan identitas etnik atau agama tertentu ternyata tidak memiliki hak yang sama untuk mengejar cita-citanya menjadi pejabat publik dengan warga lain. Ahok adalah contoh yang sangat relevan untuk menggambarkan ini. Dia sedang mengikuti proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta, ternyata harus masuk penjara karena pendapatnya yang dianggap kontroversial menurut pemahaman agama sebagian warga. Yang diadili adalah pendapatnya. Padahal dalam kerangka kebebasan dalam demokrasi, pendapat seseorang itu tidak bisa dihukum. Itu baru satu contoh. Banyak contoh lainnya yang menunjukkan pluralisme politik kita belum kuat atau bahkan menurun.

Jadi, kalau yang dinilai adalah proses pemilunya, Indonesia tergolong bebas. Walau Pilpres 2019 dituduh tidak adil dan curang, tapi kalau dalam ukuran Freedom House, tuduhan itu tidak benar. Bahkan Pilpres Indonesia dinilai sangat bagus. Yang lemah dalam hal PR kita adalah soal *political pluralism* tadi. Identitas seorang warga bisa menjadi penghalang baginya untuk mengejar cita-cita menjadi pejabat publik. Kalau seseorang dengan terbuka menyebut dirinya LGBT dan ingin menjadi Gubernur DKI, pasti akan terjadi sembahyang tahajud beramai-ramai bermalam-malam untuk mencegah dia menjadi Gubernur DKI.

Kecenderungan ini juga terlihat dalam survei SMRC. Dalam survei, kami mengajukan pertanyaan ke masyarakat di seluruh Indonesia: kalau Anda adalah warga DKI dan memiliki hak pilih dalam Pilgub DKI, siapakah yang akan Anda pilih? Anies atau Ahok? Itu ditanyakan secara nasional. Dari Aceh sampai Papua. Ternyata hanya 30 % yang menyatakan akan memilih Ahok; sementara 60 % memilih Anies dan 10 % lainnya ragu-ragu.

Kami juga ajukan pertanyaan apakah Anda keberatan atau tidak keberatan memiliki presiden berbeda agama dengan Anda? Mayoritas keberatan. Jadi kita masih memiliki persoalan di situ. Dengan bercanda saya sering mengatakan: kalau Anda beragama Kristen dan ingin menjadi Gubernur atau Walikota, lebih baik Anda masuk Islam dulu.

Indonesia mengalami kemajuan dalam hal hak politik dalam 20 tahun terakhir. Skor kebebasan Indonesia terbagus di Asia tenggara. Tapi target kita tentu bukan di situ. Kita ingin berdiri sejajar dengan Korea Selatan atau Jepang. Tapi kita masih memiliki masalah dengan pluralisme politik.

Kedua, masalah CL. Sebenarnya yang terutama menghambat skor demokrasi di Indonesia adalah masalah kebebasan sipil ini. Skornya buruk. Salah satu yang terpenting adalah kebebasan berkeyakinan dan kebebasan menjalankan keyakinan. Kebebasan beragama di Indonesia hanya berlaku untuk para penganut agama tertentu saja. Di Indonesia hanya ada enam agama yang diakui. Yang bukan enam agama itu, tidak diakui. Begitu juga dengan orang yang tidak beragama. Padahal dalam prinsip kebebasan beragama itu sebenarnya tercakup kebebasan untuk tidak beragama. Para penentang orang tidak beragama berdalih bahwa Konstitusi kita menetapkan prinsip Ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu mereka mengatakan, semua orang harus beragama. Kalau Anda tidak beragama, Anda sebaiknya diam saja. Kita akhirnya memaksa orang untuk berbohong. Kalau Anda tidak beragama, Anda terpaksa berpura-pura beragama.

Jadi, walau skor kebebasan sipil, skor kita sempat 3, sebenarnya belum banyak perbaikan soal kebebasan tersebut. Bahkan ada eskalasi pengekanan kebebasan. Kekerasan terhadap minoritas semakin menguat. Kaum Syiah diusir, begitu juga pemeluk Ahmadiyah. Dan eskalasi ini semakin menguat seiring dengan adanya kebebasan berorganisasi, menyampaikan pendapat, dan seterusnya. Dengan kata lain, kita melihat kondisi di mana toleransi dan pluralisme belum tumbuh dengan baik di satu sisi, tapi di sisi lain ada kebebasan diberikan kepada masyarakat di dalam demokrasi yang belum matang. Namun gejala ini memang terjadi di banyak tempat, bukan hanya di Indonesia.

Nah, jadi kebebasan beragama dan menjalankan keyakinan itu masih menjadi masalah besar di Indonesia. Di satu sisi, ada aspek dalam konstitusi kita yang memungkinkan terjadinya tindakan-tindakan diskriminatif, penindasan minoritas, dan kebebasan untuk tidak beragama. Kedua, negara sendiri ikut campur mendefinisikan agama warga. Negara menetapkan agama-agama yang diakui. Hanya Islam, Kristen, katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Yang di luar itu tidak diakui. Yang lucu, orang Konghucu itu sendiri tidak menganggap Konghucu sebagai agama.

Saya pernah bertanya pada orang Konghucu: "Konghucu itu agama atau bukan?" Dia ketawa dan menjawab, "bukan Mas!" "Lantas apa?" tanya saya. "Filsafat!" kata teman saya itu. Kalau orang mengatakan Konghucu adalah agama, itu justru merendahkan. Pandangan semacam itu bisa dipahami karena memang ada sejumlah ahli yang menganggap agama dikembangkan sebelum filsafat. Namun dalam hal ini, yang saya persoalkan adalah campur tangan negara dalam mendefinisikan agama yang diterima dan tidak diterima. Dalam norma-norma kebebasan demokrasi, cara pandang semacam itu tidak bisa dibenarkan. Misalnya saja salah satu agama tertua di dunia, Yahudi, tidak diterima sebagai agama di Indonesia. Kok seenaknya saja menganggap Yahudi sebagai agama yang tidak diakui.

Dalam perkembangan terakhir, bahkan ada dorongan bagi negara untuk campur tangan terhadap cara pandang keagamaan yang dianggap bertentangan dengan yang diyakini di Indonesia. Misalnya saja soal Hizbut Tahrir yang mengkampanyekan khilafah. Kalau kita yakin dengan keyakinan keagamaan kita, kita tidak perlu khawatir dengan gagasan semacam itu. Silahkan saja kita berdebat soal khilafah. Kalau ada orang-orang yang mengaku pro NKRI tapi melarang orang-orang semacam ini percaya dan mengungkapkan keyakinannya, orang-orang tersebut justru merusak NKRI. Melarang orang percaya pada khilafah itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan sipil. Ini bukan berarti saya mendukung atau percaya pada apa yang diperjuangkan FPI atau HTI. Tapi sebagai organisasi, silahkan saja mereka berdiri. Tapi begitu mereka melakukan kekerasan, itu menjadi masalah hukum. Yang harus ditegakkan adalah *rule of law*.

Jadi kebebasan sipil kita mengalami kemandegan bukan hanya karena perilaku masyarakatnya tapi juga karena pranata-pranata kenegaraannya kurang kuat melindunginya.

Ironisnya begini. Lembaga seperti FPI ini mau dibubarkan tapi sebenarnya selama bertahun-tahun kelompok-kelompok semacam ini dibiarkan mengancam hak asasi manusia. Kenapa tindakan-tindakan penindasan terhadap minoritas dan perbedaan dibiarkan? Saya akan berspekulasi sedikit. Menurut saya ada banyak elit politik kita tidak berani bersikap tegas karena ada asumsi di tingkat elit politik bahwa kelompok-kelompok yang tidak menghargai manusia itu berjumlah besar sehingga memiliki dampak elektoral. Akibatnya para elit politik itu cenderung bersikap kompromistis. Mereka yang melanggar hukum, dibiarkan saja walau aparat hukum sudah menemukan bahwa mereka jelas-jelas melanggar hukum. Jadi supremasi hukum tidak ada. Tidak ada ketegasan untuk melaksanakan dan menjalankan hukum sebagaimana mustinya.

Para elit politik cenderung berkompromi karena menyangka kelompok yang anti kebebasan sipil itu berjumlah besar. Padahal itu hanya persepsi dan tidak ada buktinya. Dalam sejarah Indonesia, kaum konservatif yang tidak toleran tidak pernah berkuasa di Indonesia. Sejak kebebasan Indonesia dibuka, partai-partai konservatif Islam tidak pernah mendapat dukungan. Yang selalu berkuasa di Indonesia adalah partai-partai sekuler, partai-partai nasionalis. Jadi seharusnya tidak ada kekhawatiran itu. Seharusnya para elit politik kita memiliki komitmen terhadap nilai-nilai yang memperlakukan kesetaraan manusia sebagai warga negara. Jadi ke depan, kita harapkan elit-elit politik Indonesia adalah orang-orang yang memiliki komitmen seperti itu untuk memajukan Indonesia yang lebih beradab.

Sebagai penutup, saya ingin menyebut tiga hal yang perlu diperjuangkan di Indonesia agar demokrasi Indonesia tidak terus menyurut.

Pertama, perlunya kepemimpinan strategis di tingkat pusat hingga daerah yang mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan warga.

Kedua, perlu pembenahan aturan yang masih memberi celah bagi praktik diskriminatif.

Ketiga, perlu kekuatan yudisial (hakim dan pengadilan) yang sangat kuat komitmennya pada prinsip kesetaraan hak warga negara sehingga ketika ada warga yang menuntut haknya di pengadilan demi kesetaraan bisa menemukan keadilan.

### **Mochtar Pabottingi (MP)**

Saya ingin menanggapi pandangan tentang adanya kemunduran dalam demokrasi kita. Freedom House menegaskan bahwa tolak ukur demokrasi adalah prinsip kebebasan dan segenap butir tolak ukur lainnya haruslah berpatokan pada prinsip kebebasan itu. Bung Saiful Mujani kemudian berargumen bahwa kemunduran yang ditandai dengan indeks kebebasan di Indonesia itu terjadi karena kelemahan pluralisme politik dan pengekan atas kebebasan keyakinan dan keagamaan seperti yang dialami pemeluk agama-agama dan keyakinan minoritas.

Saya setuju dengan pandangan tersebut. Pertanyaannya tentu saja adalah mengapa itu masih menjadi persoalan? Sebagian pihak menyatakan, kondisi demokrasi di Indonesia itu harus dimaklumi karena Indonesia adalah negara berkembang, masih banyak rakyat miskin, dan kurang berpendidikan. Buat saya jawaban itu tidak meyakinkan.

Kita ingat bahwa pendapatan per kapita Indonesia pada puncak Orde Baru adalah sebesar 2500 US Dollar. Tapi pencapaian itu tidak berdampak pada demokrasi atau demokratisasi. Seperti dikatakan Giovanni Sartori, berdasarkan data lebih dari satu abad, kita tidak bisa melihat bahwa demokrasi yang baik memiliki prasyarat ekonomi dan demokratisasi ditentukan oleh kemakmuran. Jadi kemajuan ekonomi bukan prasyarat demokrasi.

Bung Saiful tadi merekomendasikan tiga hal. Pertama, perlunya kepemimpinan strategis di pusat maupun di daerah yang menekankan kesetaraan warga negara. Kedua perlunya mengoreksi setiap aturan praktek diskriminatif bagi warga. Ketiga, perlunya rumusan kekuatan yudisial yang membela dan menegaskan berlakunya prinsip kesetaraan antar sesama warga negara di depan hukum.

Saya hanya ingin menambahkan dua hal yang menurut perspektif teoretis saya mungkin terlewat dalam pembahasan tadi. Menurut saya, salah satu hal penting adalah sentralitas *nation* dalam kinerja demokrasi. Saya pakai kata *nation* karena kata 'bangsa', bisa berarti ganda: 'bangsa' dalam artian sosiologis, atau 'bangsa' dalam artian politik. Jadi buat saya, istilah '*nation*' lebih pas. Kedua adalah determinasi integritas dan rasionalitas partai politik dalam membangun demokrasi. Ini saya kira juga luput dibicarakan.

Saya ingin memusatkan perhatian pada soal sentralitas '*nation*' dalam demokrasi. Praktis tak ada satupun dari beragam bentuk dan aset kebebasan dalam standar Freedom House yang merujuk pada soal *nation*. Ini yang saya katakan, luput dibicarakan. Menurut saya, tak ada kebebasan tanpa *nation*. Kebebasan itu sendiri adalah produk *nation*. Hanya kalau kita ber'*nation*', kita memiliki toleransi. Demokrasi bisa dikatakan adalah manifestasi kumulatif dari *nation*. Hanya karena ada *nation*, dunia bisa berdemokrasi. Hanya karena kita berdemokrasi, *nation* bisa dikukuhkan. Dengan kata lain, ada hubungan simbiosis antara *nation* dan demokrasi.

*Nation* adalah lahan paling subur dan gembur bagi demokrasi. Demokrasi lebih dari *nation*, tapi pada gilirannya atau sebagaimana mestinya, akan memperkuat serat-serat *nation*. Sama sekali tidak cukup bagi kita untuk mengidentifikasi bermasalahnya demokrasi kita dalam hal-hal pluralisme, kebebasan berkeyakinan, diskriminasi agama, dan keniscayaan kesamaan di depan hukum, tanpa mengemukakan apa yang salah di situ.

Dalam lima tahun terakhir, ada pembiaran dalam kampanye-kampanye pemilihan umum terhadap politisasi agama. Ada yang kontradiktif di situ. Segenap pemilihan umum atau apapun namanya yang di atas permukaan merupakan agenda demokrasi seharusnya adalah juga sekaligus agenda membangun *nation*. Adalah sungguh irasional ketika ada pihak-pihak yang terlibat dalam fase demokrasi itu tapi juga menikam *nation*. Setiap kali kita mencampakkan *nation*, kita juga menyia-nyiaikan demokrasi.

Pencerahan tentang keniscayaan simbiosis *nation* dan demokrasi ini telah luput dari kesadaran mayoritas bangsa kita terutama elite politik kita, termasuk keenam Presiden setelah Soekarno. Bahkan Soekarno sendiri pun tak bisa kita sepenuhnya bela, karena beliau mencampakkan demokrasi ketika ia menghapuskan konstituante hasil pemilu dan mengangkat wakil-wakil parlemen, tanpa pemilu.

Seorang kepala negara yang wawasan politiknya tercerahkan pasti tak akan membiarkan penyebaran populisme, politisasi agama, maupun radikalisme Islam. Semua itu menggerogoti wadah kebersamaan kita, yaitu *nation*. Begitu pula mestinya semua anggota parlemen, serta lembaga-lembaga penegak hukum. Presiden dan DPR juga seharusnya sudah memarahi mati-matian kampanye-kampanye yang menyerang Ahok atas basis agama. Pimpinan pemerintahan dan negara seharusnya marah karena pemilihan umum adalah agenda *nation* yang dijalankan dalam demokrasi.

Kasadaran akan *nation* ini juga mungkin tidak terdapat di kalangan masyarakat. Coba buat survei yang memuat pertanyaan kepada responden tentang sikap mereka mengenai sumpah pemuda atau siapa tokoh demokrasi yang mereka kenal? Dari sana kita bisa tahu, apakah mereka *nation-oriented* atau tidak. Kalau dia tidak bisa menjawab itu berarti dia tidak paham demokrasi.

Di Barat, wacana tentang *nation* ini sudah tidak lagi dibicarakan karena di sana gagasan *nation* ini sudah *taken for granted*. Mereka sudah hidup dengan itu. Mereka sudah tidak mempersoalkannya lagi.

Dalam kondisi normal, rasional dan tidak distortif, setiap partai politik di suatu negara adalah anak kandung *nation*. Di Inggris ada Partai Buruh dan Partai Konservatif. Di Amerika ada Partai Republic dan Partai Demokrat. Di Indonesia, partai-partai tahun 1950-an lebih normal daripada partai-partai sekarang. Partai-partai tahun 1950-an itu tumbuh sebagai anak kandung *nation* sehingga sungguh-sungguh mengambil segmennya sendiri-sendiri secara murni. Tidak tumpang tindih. Tidak ada anak kembar. Tidak ada *cloning*. Karena setiap partai politik adalah anak kandung *nation*, setiap partai politik juga wajib menjunjung *nation*. Ia berinduk dan bertali pusar pada *nation*. Sebuah partai politik dapat tetap eksis tanpa negara, namun ia mustahil eksis tanpa *nation*. Tiap partai politik menempatkan dirinya sebagai himpunan-himpunan pembela *nation*. Maka tiap kompetisi politik yang diikuti tak lain adalah untuk memperkuat serat-serat *nation*.

Saat ini demokrasi kita mundur karena tak terhitung perilaku partai politik yang justru melecehkan *nation*. Dengan demikian mereka tiada henti mengggersangkan lahan yang mustinya subur bagi tumbuhnya demokrasi. Partai politik kita saat ini pada umumnya bersifat gadungan, miskin rasionalitas politik, dan nihil karakter. Mungkin partai-partai yang berkarakter itu justru partai muda seperti PSI. Kita melihat ada tanda-tanda karakter di situ. Tapi yang di atas-atas itu tidak ada.

Praktis semua partai politik kita mengejar kepentingan-kepentingan politik yang sempit dan picik. Jadi, mereka artikulatif dan fasih dalam mengejar kepentingan-kepentingan sempit, tapi tidak fasih dalam mengejar kepentingan-kepentingan *nation*. Nah, kalau saudara-saudara mengikuti debat Presiden Amerika, calon Presiden Amerika, di situlah kita akan mendapatkan pelajaran bagus sekali. Begitu juga pidato perdana Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris kemarin. Kita bisa belajar dari mereka. Kelihatan betul mereka sungguh-sungguh berusaha mengartikulasikan kepentingan *nation* di situ, bukan bertanding untuk kepentingan sempit. Bertanding artikulasi apa yang terbaik untuk *nation*.

Amerika bisa saja dikatakan mengalami kemunduran demokrasi. Itu benar. Tapi karena mereka memiliki lembaga-lembaga demokrasi, terutama partai politik, yang kokoh, normal, dan tidak distortif, mereka selalu bisa membalikkan keadaan menjadi lebih baik lagi. Trump menang dengan manipulasi dan kecurangan. Tapi dalam pemilu sela 2018, Kongres Amerika disapu bersih oleh Partai Demokrat. Jadi orang sadar bahwa Trump menjerumuskan *nation*.

Di Indonesia, kita berada di jalan yang masih perlu banyak perbaikan. Kondisi partai politik sangat memprihatinkan. Bagi mereka, perlombaan politik hanyalah perlombaan kepentingan politik partisan yang sempit bukan perlombaan kepentingan yang menjunjung *nation*.

Dampak dari kegagalan partai-partai politik ini bisa serius. Saya rasa, kembalinya gagasan Dwi Fungsi TNI terjadi karena pembusukan partai politik. Partai politik tidak berhasil mencetak pemimpin-pemimpin nasional yang orisinal, yang berintegritas, dan memiliki nasionalitas yang tinggi. Akibatnya, TNI akan memandang rendah sipil. Coba kalau tumbuh pemimpin-pemimpin yang sungguh-sungguh dari bawah, akan lahir tokoh, seperti Barack Obama. Di Indonesia, tidak ada pengkaderan dalam partai politik untuk mencapai kepemimpinan nasional.

Tidak pernah terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM berat, menurut saya, juga karena tidak adanya kesadaran *nation*. Seolah-olah *nation* hanyalah milik sendiri, milik partai, milik TNI. Kita seharusnya belajar dari pengalaman Afrika selatan. *Common denominator*-nya adalah *nation*. Setelah perjalanan panjang penindasan kulit putih atas kulit hitam, mereka mengatakan: "Sekarang kalian bisa kami maafkan, tapi mengakulah. Akuilah perbuatan kalian dan akan kami maafkan." Itu bentuk

penghormatan terhadap *nation*. Demi kebersamaan kita dalam satu *nation*, akuilah apa yang sudah terjadi. Kalau tidak mau mengaku, ya tidak akan selesai. Itu yang tidak terjadi Indonesia.

### **Abdul Malik Gismar (AMG)**

Saya akan buka presentasi saya dengan sebuah premis: faktor-faktor yang menjadikan demokrasi stabil bisa jadi bukanlah faktor-faktor yang melahirkan demokrasi. Jadi barangkali faktor yang melahirkan demokrasi adalah kebebasan, tapi kebebasan tidak bisa diharapkan menjadi faktor yang membuat demokrasi bertahan. Agar bisa dipertahankan, demokrasi mungkin membutuhkan faktor lain.

Sekarang saya ingin menyinggung Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang tadi juga disinggung Pak Saiful. Dalam IDI, pengukuran kebebasan sipil di-*breakdown* ke dalam sejumlah kelompok: kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi. Sama dengan hasil Freedom House, selama bertahun-tahun IDI menunjukkan *civil liberty* kita secara umum baik. Tapi sebetulnya kita perlu melihat keempat dimensi tersebut secara lebih seksama.

Para peneliti mempelajari apakah di sebuah provinsi terdapat kejadian atau berapa banyak insiden terjadi yang terkait dengan empat variabel kebebasan tersebut. Pertanyaannya adalah apakah di provinsi tersebut ditemukan kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan oleh masyarakat ke masyarakat lainnya, dan juga kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan oleh negara terhadap warga.

Unit politik penghitungan IDI adalah provinsi. Para peneliti mempelajari apakah selama satu tahun di provinsi itu terjadi peristiwa yang menunjukkan adanya ancaman yang menghambat kebebasan. Indikator pertamanya adalah peristiwa yang terungkap dalam koran. Peneliti mempelajari isi koran selama satu tahun. Temuannya dibawa ke sebuah *Focus Group Discussion* (FGD) yang menyertakan orang-orang yang dianggap *well informed person* di provinsi itu. Kemudian kalau masih ada kurang-kurangnya ditanyakan dalam wawancara mendalam. Sumber lain yang juga dipelajari adalah dokumen polisi atau dokumen apapun yang bisa digunakan untuk menunjukkan gejala yang dipelajari itu.

Ternyata ditemukan bahwa kondisi kebebasan berkumpul, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi di banyak provinsi di Indonesia lumayan bagus. Ada provinsi yang pelanggaran terhadap kebebasannya agak tinggi, ada provinsi yang pelanggaran terhadap kebebasannya agak rendah. Tapi agregat nasionalnya menunjukkan pelanggaran terhadap kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi cukup rendah. Sementara itu, yang secara agak konsisten ditemukan bahwa jenis pelanggaran yang cukup tinggi adalah pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat.

Ini menarik karena menjadi berbeda dengan anggapan bahwa di Indonesia jumlah mereka yang tidak toleran terhadap perbedaan keyakinan dan agama sangat tinggi. Kalau kita melihat IDI, anggapan ini mungkin tidak berdasar. Tingkat pelanggaran terhadap kebebasan berkeyakinan dan beragama di tingkat nasional sebenarnya rendah. Soal kebebasan berkeyakinan ini menjadi bermasalah ketika dia dijadikan komoditas politik, berinteraksi dan beririsan dengan persoalan-persoalan politik. Saya tidak ingin mengatakan bahwa soal kebebasan berkeyakinan itu bukan persoalan. Masalah kebebasan berkeyakinan memang masalah, tapi itu bukan masalah paling besar. Yang menjadi inti masalah adalah kebebasan berpendapat.

Mengenai kebebasan beragama sendiri, saya ingin menekankan dimensi lain. Seringkali yang menjadi persoalan dengan kebebasan beragama adalah buruknya penanganan isu-isu agama ini di tingkat peraturan. Misalnya saja, soal Peraturan Bersama Menteri (PBM). Saya sudah berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia, dan dapat dikatakan PBM itu bukannya menyelesaikan masalah, tapi malah menimbulkan masalah. Akibatnya di manapun di Indonesia ini, kalau minoritas ingin bikin rumah ibadah pasti kesulitan. Dan itu terjadi untuk setiap agama. Jadi kalau umat Kristen mau membangun rumah ibadah di daerah yang mayoritas penduduknya muslim, pasti sulit. Demikian juga kalau umat muslim ingin buat rumah ibadah di wilayah yang mayoritas penduduknya non muslim, juga sulit. Silakan coba bangun rumah ibadah di Manokwari atau di Kupang. Kecenderungannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini persoalan *governance*. Kalau masyarakatnya ditanya, apakah mereka anti dengan rumah ibadah umat beragama lain, sebenarnya tidak. Penataan ini seharusnya sudah bisa diselesaikan oleh para wakil rakyat di DPR dan DPRD. Soal pembangunan rumah ibadah jangan diserahkan ke jalanan. Ya pasti berkelahi.

Jadi, pertama-tama, saya rasa yang mengancam kebebasan itu bukan mayoritas warga. Tentu ada kelompok-kelompok tertentu yang mengancam, tapi bukan mayoritas warga.

Yang perlu dilihat juga dalam IDI adalah partisipasi politik warga. Judul aslinya di IDI adalah 'partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan penyelenggaraan negara'. Tapi kita sederhanakan saja menjadi partisipasi politik.

Pertama-tama kita bisa melihat kecenderungan partisipasi yang damai. Misalnya, demonstrasi yang damai dan tertib, protes, surat, petisi, dan sebagainya. Data IDI menunjukkan ada kecenderungan meningkat sampai tahun-tahun terakhir. Jadi, dapat dikatakan tingkat partisipasi yang damai itu terus membaik.

Sebaliknya, data partisipasi yang berakhir dengan kekerasan, terus memburuk. Sempat membaik pada 2016, tapi kemudian memburuk lagi. Jadi, partisipasi yang damai terus meningkat, tapi partisipasi politik yang berakhir dengan kekerasan juga meningkat.

Pertanyaannya, dalam kasus-kasus apakah partisipasi politik yang berakhir dengan kekerasan terjadi? Mungkin banyak yang mengira bahwa itu terutama terkait dengan konflik-konflik keagamaan. Tapi, ternyata tidak. Yang paling tinggi adalah yang terkait dengan perselisihan buruh atau tanah. Ini biasanya terkait dengan protes yang tidak selesai-selesai sehingga akhirnya bergulir ke jalan. Dan ketika di jalan, perbenturannya menjadi cenderung melibatkan kekerasan.

Salah satu kasus yang sering muncul adalah penyegelan sekolah karena tanah untuk pembangunan sekolahnya belum dibayar. Ini biasa berujung dengan kekerasan. Konflik-konflik ini terjadi di hampir semua provinsi di Indonesia. Dan ini terjadi karena *bad governance*.

Dengan gambaran itu, saya ingin menunjukkan bahwa persoalan kebebasan sipil ini sebenarnya memiliki kompleksitas tersendiri.

Ini ingin saya tempatkan dalam konteks pertanyaan yang lebih luas: apakah demokrasi mengalami kemunduran? Ini sudah mulai ditanya-tanyakan agak lama sebetulnya, sehingga pada tahun 2015 *Journal of Democracy* mengangkat tema khusus 'Is democracy in decline?' Yang menulis di sana adalah

kumpulan orang-orang yang sangat terkemuka dalam pembicaraan soal demokrasi: Francis Fukuyama, Robert Kagan, Larry Diamond, Marc Plattner, Alfred Stepan, Philippe Schmitter, dan seterusnya. Kurang lebih kesimpulannya: ya, demokrasi global mengalami kemunduran. Ada yang bilang kemunduran, ada yang bilang 'krisis', dan ada yang bilang '*demotion*' (penurunan status).

Sekarang kita melihat gejala kemunduran demokrasi terjadi baik di Amerika Serikat – dengan Donald Trumpnya – maupun di Eropa Barat. Kecenderungan populis di sana menguat. Sikap anti imigran lumayan besar di seluruh Eropa Barat. Di Rumania saja 82 % penduduknya anti imigran. Dan semakin menguat juga di Polandia, Prancis, Belanda, Finlandia, Denmark, Inggris, Italia, Swedia, Spanyol, dan seterusnya. Bahkan negara-negara yang kita anggap luar biasa baiknya demokrasinya, gerakan populisme juga menguat. Para politisi dari partai-partai populis itu banyak yang berhasil masuk ke kursi parlemen. Artinya, mereka mendapat dukungan luar biasa dari rakyat. Tinggal satu langkah lagi sebelum mereka menggulirkan kebijakan-kebijakan anti-asing.

Nah, pertanyaannya kenapa ini terjadi? Saya kira ini tidak bisa dilepaskan dari performa demokrasi. Tadi saya katakan ruh demokrasi itu barangkali memang adalah kebebasan. Tapi agar kebebasan dan demokrasi itu bisa dipertahankan, kita membutuhkan sesuatu yang lain. Contoh dari Eropa Barat itu menunjukkan bahwa rakyat yang hidup dalam alam demokrasi itu mulai menunjukkan ketidakpuasan terhadap demokrasi (*democratic discontent*). Gerakan '*Occupy*' dengan slogan '*We are the 99 %*' adalah contoh yang menunjukkan bahwa rakyat merasa tidak terwakili dalam ruang-ruang demokrasi parlemen. Mereka merasa parlemen yang mereka pilih tidak memperjuangkan nasib mereka. Ini juga terlihat dalam demonstrasi rompi kuning di Prancis belum lama ini. "Kita memimpikan dunia yang lain," kata mereka. Itu artinya, dunia demokratis yang mereka huni hari ini sudah tidak cocok bagi mereka.

Itu juga mungkin terjadi di Indonesia. Salah satu indikasinya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM di Indonesia itu bisa dikatakan sejak 20 tahun lalu stagnan, tidak naik-naik. Tidak ada kenaikan signifikan. Garisnya datar. Jadi setelah kita 20 tahun berdemokrasi, tidak ada perubahan berarti dalam IPM kita. Ini berbeda sekali dengan Korea Selatan. Dalam 30 tahun IMP Korea melejit cepat sehingga lebih tinggi dari Jepang. Salah satu indikatornya, cek saja di ruangan ini. Mana yang lebih banyak: HP Sony atau HP Samsung?

Saya gunakan indikator pendidikan. Rata-rata lama sekolah orang Indonesia yang umurnya 25 tahun ke atas itu adalah sekitar delapan tahun. Jadi, rata-rata hanya sampai kelas 2 SMP. Dan ini agak kontras dengan harapan lama sekolah, yakni gambaran kapasitas negara untuk menyekolahkan anak. Sekarang sebetulnya negara ini mampu menyekolahkan anak-anak sampai 12,72 tahun. Jadi sebenarnya negara mampu membiayai sekolah anak sampai lulus SMA. Tapi kenapa ternyata dalam kenyataan tidak begitu? Sekadar membangun institusi sekolah memang gampang, terutama kalau dananya memang tersedia. Yang jadi masalah adalah mengajak orang benar-benar masuk ke sekolah. Tingkat *drop out* anak-anak di DKI saja tinggi. Angka partisipasi murni nasional anak tahun 2016 itu begini: kalau di tingkat SD angkanya mencapai 93 %, pada SMP tinggal 81 %, dan pada tingkat SMA tinggal 59 %.

Karena itu, saya katakan salah satu persoalan dengan demokrasi saat ini adalah adanya ketidakpuasan terhadap demokrasi.

Dalam hal ini, saya merasa ada tiga kunci jawaban persoalan: legitimasi, pemerintahan yang efektif, dan soal *civic virtue*.

Salah satu persoalan besar yang tadi tidak disebut terkait dengan legitimasi adalah soal partai politik dan lembaga politik. Kalau soal pemilu yang bebas dan adil, kita sudah tidak punya masalah. Tapi kemudian pertanyaannya: apakah pemilu tersebut berhasil melahirkan representasi yang efektif terhadap para pemberi suara dalam pemilu? *Vote* yang dikumpulkan dalam pemilu tidak menjadi *voice* (suara rakyat) di DPR dan DPRD. *Vote* dan *voice* tidak *nyambung*.

Dalam hal pemerintahan yang efektif, indikasi yang saya pikir lumayan signifikan adalah IPM tadi. Kalau itu dibiarkan stagnan, akan tumbuh ketidakpuasan demokrasi yang bisa dimanfaatkan oleh banyak kepentingan.

Keamburadulan demokrasi di Amerika Serikat, saya rasa juga disumbang oleh ketidakpuasan demokrasi ini. Pagi ini, saya menonton berita CNN International tentang penembakan massal lagi di El Paso. Tercatat 20 sudah tewas di mal. Penembaknya dari kelompok *white supremacy* sudah mengeluarkan manifesto yang berisi kebencian terhadap imigran dan sangat *xenophobic*. Kecenderungan serupa mungkin bisa menjelaskan apa yang kita lihat di Jakarta dan Pilpres 2019.

Yang terakhir adalah *civic virtue*. Saya pernah diundang BAPPENAS yang memiliki program 25 tahun, 2020-2045. Salah satu program besarnya adalah pendidikan politik. Saya tanya target dari pendidikan politik ini apa? Ternyata mereka sendiri tidak pasti. Saya khawatir, akhirnya ini cuma sekedar rangkaian seminar dan sebagainya. Padahal orang Indonesia sebenarnya memiliki bentuk partisipasi politiknya sendiri. Bahkan masyarakat desa pun aktif secara politik. Yang melakukan aksi-aksi protes di desa itu, umumnya lulusan SMP. Ini adalah tantangan riil yang harus diatasi dengan dingin dan dipikirkan dengan dingin. Jargon tidak akan menyelesaikan masalah.

## SESI TANYA JAWAB

### Pertanyaan Pertama

Saya melihat dari pemberitaan media internasional, ada perhatian besar terhadap demokrasi di Indonesia. Dalam kampanye presiden AS misalnya, nama Indonesia disebut-sebut oleh sejumlah kandidat sebagai negara yang layak untuk menjadi negara demokrasi tapi masih menghadapi tantangan di dalam Indonesia sendiri. Bagaimana komentar Anda?

### Jawaban atas Pertanyaan Pertama

SM:

Lepas dari segala kekurangan kita, kalau dilihat dengan spektrum yang besar secara global, Indonesia memang tidak terlalu buruk dalam soal politik. Kalaupun di dalam negeri sendiri ada yang mencaci maki, itu biasa dalam demokrasi. Buat banyak negara lain, kemenangan Jokowi di Indonesia untuk kedua kalinya adalah sesuatu yang luar biasa. Sesuatu banget! Banyak yang tidak menyangka rakyat Indonesia akan memilih Jokowi sebagai presiden dua kali. Kemenangan Jokowi itu dilihat sebagai kemenangan egalitarianisme politik. Dan itu nilai yang sangat penting bagi demokrasi.

Sementara itu, sebagaimana tadi dibicarakan, ada kekhawatiran mengenai demokrasi di Amerika Serikat. Saya sering menyindir kawan-kawan di Amerika: "Ah kalian itu, pada pinter-pinter, tapi kok yang dipilih Trump?" Walau kita harus *fair* juga mengakui bahwa terpilihnya Trump itu terjadi karena sistem pemilihannya berbeda dengan kita. Kalau setiap warga punya suara yang sama, yang menang Hillary. Jadi, memang kurang *apple to apple* membandingkan Amerika Serikat dengan Indonesia.

Saya ingin komentar sedikit juga terhadap pernyataan Bung Malik yang bicara soal tumbuhnya semangat anti-asing di Amerika Serikat. Menurut saya, kita tidak boleh lupa bahwa saat ini ada imigrasi besar-besaran yang mengubah komposisi demografi di sana. Ini yang menjadi tantangan bagi keyakinan mereka mengenai kebebasan sipil. Seberapa jauh kita bisa menerima orang asing?

Tentang serbuan imigran asing ini juga dihadapi Eropa. Bahkan di negara-negara Skandinavia yang memiliki tradisi demokrasi tinggi, rakyatnya juga terganggu dengan para imigran ini. Kalau Jerman terlihat lebih menerima, karena mereka memiliki punya pengalaman historis yang khusus di masa lalu terkait Yahudi.

Di Indonesia kita tidak menghadapi serbuan orang asing ini. Diskriminasinya ditujukan pada orang Indonesia sendiri. Tapi dalam hal ini saya mau cerita sedikit tentang perumahan saya. Saat ini saya punya banyak tetangga yang adalah kaum imigran dari Afrika. Saya senang karena sekarang di Ciputat saya memiliki tetangga imigran dari Afrika. Saya bangga bahwa Ciputat sudah kosmopolit. Saya bangga Indonesia terbuka terhadap mereka yang harus meninggalkan negaranya karena perang atau sekadar berusaha menyelamatkan diri untuk hidup.

Tapi kembali ke pertanyaan tadi, saya percaya negara-negara demokratis lain memperhatikan Indonesia. Dalam hal ini justru kita yang bisa menjadi contoh bagi negara-negara maju tadi. Apalagi kita selama ini selalu dipandang sebagai negara muslim terbesar sehingga kita terkena stigma tentang ketidaklayakan demokrasi di dunia Islam. Indonesia bisa menunjukkan kita tidak begitu. Kita harapkan yang jadi

pemimpin di negara manapun adalah orang-orang yang lebih terbuka terhadap nilai-nilai manusia itu, termasuk di sini.

MP:

Ya, Amerika Serikat pasti memiliki perhatian pada Indonesia. Saya juga melihat Farid Zakaria (komentator politik AS) menyatakan bahwa Indonesia berada di ujung tanduk dan bisa saja tergulung oleh fundamentalisme agama seperti negara-negara yang lain. Dia membayangkan kita sedang berada pada fase ke arah sana. Walau yang kita lihat sendiri, itu tidak terjadi.

Saya rasa perhatian Amerika itu penting. Begitu juga, Amerika tetap relevan untuk kita ikuti. Saya melihat demokrasi mereka matang. Partai-partainya mantap. Sistem hukumnya juga sudah berjalan dengan baik. Daya lentur politik demokrasinya terhadap berbagai guncangan sangat kuat.

AMG:

Saya ingin memusatkan jawaban saya pada soal demokrasi Amerika sendiri. Menurut saya, tumbuhnya ketidakpuasan demokrasi di sana bukan terutama karena banjirnya imigran asing. Gerakan *Occupy Wall Street* dan *We are the 99 %* adalah bentuk ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi yang dihasilkan demokrasi. Muatan ketidakpuasan terhadap demokrasinya tinggi sekali. Ketidakpuasan itu bertemu dengan demagog, seperti Donald Trump.

Trump menggunakan itu. Salah satu tema kampanye Trump pada 2016 adalah: *Drain the Swamp*. Meringankan rawa-rawa. Yang dimaksud dengan rawa-rawa yang berisi lumpur, biaya, dan sebagainya adalah Washington DC. Rawa-rawa adalah metafora bagi Washington DC. Keringkan Washington DC dari para buaya untuk diganti oleh Trump dan orang-orangnya. Jadi, Trump adalah demagog yang memakai ketakutan-ketakutan orang, prasangka-prasangka orang, dan sebagainya untuk kepentingan politiknya. Ternyata itu efektif.

Hal serupa kita temui di Indonesia. Di Pilpres Indonesia, kita juga melihat ada para demagog yang memakai ketakutan-ketakutan masyarakat untuk kepentingan politik. Pelajaran besarnya, ketika diskonten bertemu demagog, hasilnya bisa sangat brutal.

### **Pertanyaan Kedua**

Pertama, kalau dikatakan demokrasi Indonesia meredup, bagaimana kita menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres dan pileg kita sangat luar biasa? Kedua, apakah memang ada hubungan linier antara demokrasi dengan kesejahteraan? Negara kita sudah demokratis, tapi secara ekonomi kita masih harus berjuang. Coba sekarang kita bandingkan dengan negara khilafah atau negara seperti Arab Saudi. Mereka tidak demokratis tapi sangat sejahtera. Ketiga, soal oposisi. Bagaimana kita sebaiknya melihat upaya kubu Prabowo dan sejumlah partai koalisinya yang berusaha mendekati Teuku Umar? Bukankah ini akan merusak sistem demokrasi kita karena tanpa oposisi tidak akan ada kontrol?

## Jawaban atas Pertanyaan Kedua

SM:

Kinerja demokrasi memang tidak bisa diukur dari jumlah orang yang datang ke TPS. Kontribusi partisipasi politik dalam bentuk ikut memilih terhadap kinerja demokrasi paling-paling 1 %. Di Amerika Serikat, yang ikut memberikan suara mungkin hanya 50 %. Di Korea Selatan hanya 60 %. Tapi demokrasinya jauh lebih maju. Tentu saja jumlah pemberi suara itu penting, tapi tidak penting-penting amat untuk mengukur kinerja demokrasi.

Kedua, soal hubungan demokrasi dengan kesejahteraan. Demokrasi tidak dengan sendirinya melahirkan kesejahteraan. Demikian pula kesejahteraan bukanlah sebab bagi demokrasi. Namun, sebuah negara yang memiliki kesejahteraan ekonomi dan sosial tinggi akan memiliki kondisi yang memungkinkan demokrasi relatif lebih bisa bekerja, lebih stabil, dan lebih bisa mengalami kemajuan.

Di antara para teoretisi, tidak ada kesepakatan tentang kondisi apa yang akan melahirkan demokrasi. Contoh saja di Indonesia. Demokrasi kita lahir karena ada krisis ekonomi. Kenapa bukan militer yang mengambilalih? Kenapa bukan Pak Wiranto? Tidak ada jawaban sederhana.

Kesejahteraan tidak dengan sendirinya melahirkan demokrasi. Singapura sangat sejahtera, tapi tidak memiliki demokrasi. China sekarang juga sudah sangat sejahtera. Sangat maju ekonominya. Tapi tetap anti demokrasi.

Jadi, secara umum, demokrasi memang berkembang di negara-negara yang lebih sejahtera tapi tidak dengan sendirinya negara sejahtera melahirkan demokrasi. Negara tidak sejahtera juga bisa saja demokratis. India adalah negara miskin untuk waktu yang lama. Tapi selalu demokratis.

Negara-negara Timur-Tengah yang lebih sejahtera juga tidak membangun demokrasi. Akibatnya orang mempertanyakan, kalau memang bisa sejahtera kenapa harus menggunakan demokrasi? Tapi Timur-Tengah saya rasa berbeda dengan kasus Singapura dan Cina. Negara seperti Arab Saudi menjadi sejahtera karena diberi kekayaan alam oleh Tuhan. Manusia tidak penting di sana. Yang menentukan tambang minyak. Dan itu soal takdir. Tapi tidak semua negara bisa memiliki itu. Negara-negara yang tidak kaya minyak, seperti Suriah dan Yaman terpaksa perang karena tidak mampu membayar rakyat yang tidak puas dengan kondisi ekonomi mereka. Tapi Arab Saudi pun harus hati-hati. Kalau minyak mereka habis, mereka juga mungkin menghadapi kesulitan ekonomi. Sejauh ini bagi mereka, memang tidak ada insentif untuk mengembangkan demokrasi. Masyarakat tidak merasa harus memperjuangkan hak-hak demokrasi karena hidup mereka sudah disubsidi negara. Semua sudah disediakan negara. Tapi kalau sumber daya alam sudah habis, ceritanya mungkin lain.

Sebaliknya, kita bisa melihat Korea Selatan. Alam mereka miskin. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi bisa maju karena menghargai manusia. Yang diutamakan adalah sumber daya manusia.

Ketiga, soal opisisi. Saya tidak tahu harus mengungkapkannya seperti apa. Tapi bagaimana mungkin kubu yang sudah bertarung habis-habisan memobilisasi massa, seperti yang kita lihat di depan Sarinah, tiba-tiba saja memilih untuk bergabung dengan yang menang? Damai tentu saja baik. Tapi damai tidak harus berada dalam satu kubu. Ini semacam ujian buat keadaban kita. Yang kalah sebaiknya mengaku

kalah, tapi masak ingin masuk ke dalam pemerintahan begitu? Ingin masuk kabinet? Ingin jadi Ketua MPR? Maksudnya apa?

Saya menganggap yang terbaik adalah kalau Prabowo dan Gerindra berada di luar pemerintahan. Ini bisa sangat positif. Gerindra, PDIP, dan Golkar pada dasarnya sama. Mereka tidak punya perbedaan konsep tentang *nation*. Jadi, kalau oposisi berdebat dengan Jokowi, bahasanya sama. Tidak bicara berdasarkan agama. Yang diperdebatkan adalah soal jalan rusak, soal siapa yang pantas jadi gubernur di daerah, soal kompetensi, dan sebagainya. Tapi kalau oposisinya Hizbut Tahrir ya agak susah. Kalau HTI berkembang menjadi partai besar seperti Gerindra, sulit untuk berdiskusi karena bahasanya berbeda. Akhirnya perang.

Jadi menurut saya, kita membutuhkan oposisi karena oposisi adalah keniscayaan, dan yang paling cocok menjadi oposisi adalah Gerindra. Kalau kedua kubu bersatu, itu mencederai demokrasi kita. Mencederai rasa keadilan. Mencederai partai-partai yang selama ini sudah berada dan membela Jokowi. Lebih beradab kalau Prabowo berada di luar, mengakui bahwa pemilu sudah selesai dan Jokowi adalah Presiden. Kalau masih mau menjadi presiden, ya maju lagi tahun 2024. Kalau tidak mau maju lagi pada 2024, ya cari saja calon lain yang lebih beradab.

MP:

Saya rasa tingkat partisipasi yang tinggi dalam Pilpres 2019 bukan merupakan penanda demokrasi berjalan baik. Pilpres 2019 bukan pertandingan demokrasi. Tingginya partisipasi terjadi karena orang masih menyimpan dendam lama, kembali ke Pilpres 2014. Jadi bisa dilihat sebagai *rematch*, pertandingan ulang. Karena itu, bagi saya ini bukan pertandingan demokrasi, melainkan pertandingan eksistensial, hidup atau mati. Pertandingan itu bukan lagi indeks demokrasi, tapi indeks ketakutan. Tingkat partisipasi 87 % itu indeks ketakutan, bukan indeks demokrasi.

Soal demokrasi dan kesejahteraan, saya percaya bahwa demokrasi mendorong peningkatan pemerataan kesejahteraan. Itu ditulis Alexis de Tocqueville dalam bukunya *Democracy in America*. Dia menunjukkan bahwa di Amerika Serikat, dengan menjalankan demokrasi, terdapat pergeseran yang menyebabkan kelas ekonomi bawah naik untuk mengejar ketertinggalan dari kelas ekonomi atas. Jadi, ada dampak demokrasi terhadap keseimbangan kesejahteraan.

Di India juga. Banyak tulisan menunjukkan demokrasi menaikkan posisi kelas pariah, kaum *untouchable*, kelas yang tidak tersentuh ke atas menjadi pemegang kekuasaan, menjadi penentu kebijakan pemerintah.

AMG:

Menurut saya salah satu persoalan penting dalam politik dan demokrasi di Indonesia adalah apa yang saya sebut sebagai: diskoneksi. Ada diskoneksi vertikal, ada diskoneksi horizontal.

Pertama soal diskoneksi vertikal. Presiden jelas punya legitimasi politik di tingkat nasional. Tapi di daerah, juga ada gubernur dan bupati yang memiliki legitimasi politik di daerah masing-masing. Mereka adalah orang yang dipilih oleh rakyat di daerahnya masing-masing. Akibatnya apa yang diinginkan Presiden bisa saja tidak *nyambung* dengan yang dijanjikan gubernur di provinsi dan dijanjikan bupati di kabupaten. Terjadi diskoneksi.

Diskoneksi berikutnya adalah yang bersifat horizontal. Menteri yang satu dengan menteri yang lain tidak *nyambung*. Kadang-kadang begitu. Kebijakan mereka tidak sejalan atau tidak terhubung.

Dan saya rasa ini banyak kaitannya dengan soal institusi politik yang ekstraktif. Saya ingin merujuk pada buku yang ditulis Daron Acemoglu dan James Robinson, *Why Nations Fail?* Menurut mereka, negara yang berhasil adalah negara yang memiliki institusi politik inklusif, yaitu yang melibatkan partisipasi masyarakat; sementara yang gagal adalah negara yang memiliki institusi ekstraktif, yaitu yang dikuasai hanya oleh elit dan mereka memeras masyarakat melalui kegiatan politiknya itu.

Kita lihat saja partai politik kita. Partai kita mencari uang dari kegiatan politiknya agar *survive*. Mereka mengeruk uang dari kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan. Bahkan para menteri dari partai menjadi sumber pemasukan uang. Perjalanan-perjalanan yang dilakukan adalah untuk mencari uang. Ini akan menjadi masalah terus selama institusi politik kita berperilaku seperti ini.

Acemoglu dan Robinson tiba pada kesimpulan itu dengan melakukan studi lintas sejarah dan lintas geografis. Menurut mereka, yang menyebabkan satu negara gagal atau terpuruk itu bukan kulturnya, bukan agamanya, bukan mentalnya, bukan yang lain-lain. Yang menentukan adalah institusinya. Institusi politik yang ekstraktif itu mencari duit dari kegiatan politiknya. Mereka memeras. Bahkan undang-undang pun dibuat untuk memeras. Ketika institusi politik di negara itu ekstraktif, negara itu akan terpuruk. Saya khawatir Indonesia bisa juga terpuruk kalau kita biarkan institusi politik kita ekstraktif.

Jadi, demokrasi ini memang barang yang kompleks. Bahkan misterius. Orang Afghanistan menyebut diri mereka demokratis kok. Korea Utara juga begitu. Jadi tidak ada satu faktor tunggal yang menjadi penentu keberhasilan demokrasi. Penjelasannya multi-sisi. Kita tidak bisa hanya mengukurnya dari partisipasi politik. Banyak lagi faktor lain dalam demokrasi yang akan menyumbang terhadap sukses atau gagalnya demokrasi, di manapun.

Akan halnya hubungan demokrasi dan kesejahteraan, saya berpandangan, kalau demokrasi jalan dengan baik, saya kira kesejahteraan juga akan bisa dicapai dengan lebih mudah. Ini jangan dipandang sebagai *zero-sum game*: demokrasi akan mengancam kesejahteraan, dan peningkatan kesejahteraan tidak membutuhkan demokrasi. Memang demokrasi memiliki wajah buruk juga. Kalau yang dilihat protes-protesnya, teriak-teriaknya, memang wajahnya jadi terkesan buruk. Terkesan tidak efisien. Tapi kita memang harus membiasakan diri dengan itu. Karena pemerintah yang baik membutuhkan legitimasi. Harus ada keseimbangan antara pemerintah yang efektif dan pemerintah yang *legitimate*.

### **Pertanyaan Ketiga**

Pertama, terkait dengan temuan SMRC bahwa 60 % publik Indonesia menolak Ahok kalau menjadi pemilih di Pigub DKI. Bagaimana kita membaca angka itu? Apakah ini memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita? Kedua, kalau kita sepakat bahwa ada penurunan kualitas demokrasi, siapakah yang paling berkontribusi terhadap penurunan ini: negara, pemerintah, atau *civil society*? Kalau misalnya negara atau pemerintah, atau penguasa, bukankah mereka ini adalah produk-produk dari pemilu yang dipilih oleh rakyat? Bukankah mereka mewakili suara rakyat? Kalau begitu, kualitas pemilu itu seharusnya juga berpengaruh terhadap hasilnya.

Selanjutnya, saat ini terdapat kekhawatiran bahwa negara akan menekan siapapun yang mengambil sikap oposisi. Ada pandangan: "Wah kalau oposisi akan gampang kena proses hukum". Tapi di sisi lain, orang sekarang juga melihat bahwa orang-orang yang semula dianggap melanggar hukum karena *hate speech* atau penyebaran hoax sekarang ternyata dibebaskan. Orang seperti Eggy Sujana, Tofa Lemon, atau juga ratusan orang yang sudah dituduh dalam kerusuhan Mei sudah dibebaskan. Ini membuat orang kehilangan kepercayaan akan penegakkan hukum. Kok kesannya pemerintah bermain-main saja dengan kasus-kasus hukum ini.

Terakhir soal *right wing populism*. Apakah gerakan *right wing populism* yang seolah terjadi di Indonesia itu juga fenomena sesaat? Jadi bukan karena dilandasi keyakinan ideologis melainkan sekadar bagian dari drama politik yang pragmatis. Misalnya, apakah pertemuan antara Jokowi dan Prabowo atau antara Prabowo dan Megawati akan bisa menjadi obat antibiotik untuk menyembuhkan penyakit *right wing populism* ini. Kalau ini benar terjadi, maka secara telanjang mata kita bisa melihat bahwa gerakan ini hanya sekadar gerakan politik pragmatis saja. Dan kalau orang melihat ini, apakah orang tidak akan kembali bersikap moderat karena sebenarnya ini semua sekadar permainan politik?

### **Jawaban atas Pertanyaan Ketiga**

SM:

Saya mulai dengan soal intoleransi. Saya berulang kali memasukkan masalah intoleransi dalam survei-survei saya. Sejak disertasi saya tahun 1999. Jadi, saya punya data longitudinal yang cukup panjang.

Salah satu pertanyaan adalah soal seberapa jauh seseorang bisa menerima orang dari kelompok tertentu menjadi pejabat publik. Kelompok-kelompok tertentu itu tidak harus agama. Bisa juga, misalnya komunis. Dalam survei, responden diminta menyatakan siapakah kelompok yang paling tidak ia sukai. Kemudian ditanya lagi, apakah ia bisa menerima orang dari kelompok yang tidak ia sukai itu menjadi pejabat publik.

Tidak menyukai kelompok tertentu adalah normal. Setiap kita bisa saja tidak menyukai kelompok lain. Tapi ini menjadi sikap intoleran bila ketidaksukaan kita itu membuat kita merasa orang itu tidak boleh mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Dulu kelompok yang paling tidak disukai adalah PKI. Intoleransi terhadap PKI dari dulu selalu tinggi. Sekarang memang agak membaik, ketika demokrasi kita membaik. Tapi sejak 2012-2013, subjek yang menjadi sasaran intoleransi itu berubah. Bukan hanya PKI. Tapi muncul LGBT, ISIS, Hizbut Tahrir.

Tidak suka kepada Hizbut Tahrir sebetulnya wajar saja. Tapi sikap toleransi kita diuji dengan pertanyaan apakah sebagai seorang yang lahir di Indonesia, anggota HTI itu juga memiliki hak yang sama untuk menjadi apapun di negara ini. Orang HTI itu harusnya tidak boleh dihalang-halangi, kecuali dia melakukan tindak kriminal.

Toleransi ini penting dan yang memungkinkan kita hidup sebagai *nation*. Salah satu pertanyaan terpenting adalah: apakah Anda mengizinkan kaum minoritas menjadi pejabat publik? Di Indonesia, salah satu faktor penting adalah perbedaan agama. Itu yang tadi saya katakan mengenai Ahok. Di Jakarta, Ahok memperoleh 43 % suara. Warga non-muslim di Jakarta tidak lebih dari 15 %. Jadi bisa

diperkirakan ada sekitar 28 % muslim yang memilih Ahok. Orang-orang ini yang bisa kita anggap memiliki toleransi tingkat tinggi.

Dalam survei hal itu yang ditanyakan pada publik nasional. Kami ingin melihat berapa banyak orang Islam di Indonesia yang memiliki toleransi tinggi semacam itu. Karena itu ditanyakan kepada warga, kalau dia adalah seorang warga DKI pada 2017, apakah dia akan memilih Ahok atau Anies. Ternyata angka paling tinggi yang memilih Ahok adalah 40 %. Itu di kota-kota, dan ada hubungan dengan pendidikan. Muslim yang berpendidikan lebih tinggi cenderung lebih bisa menerima Ahok.

Saya menduga orang-orang tidak toleran ini makin lama akan semakin hilang. Orang yang berpendidikan tinggi akan lebih toleran. Jadi, kalau mau membangun demokrasi, mulailah dari pendidikan. Persentase APBN pada pendidikan sejak reformasi memang paling tinggi, tapi hasilnya belum terlihat.

Jadi, kalau ditanya apa arti hasil survei yang menunjukkan 60 % tidak akan memilih Ahok, jawabannya ya masih pada tahap itu tingkat toleransi kaum muslim pada non-muslim. Implikasi praktisnya sederhana: siapapun yang berpikir untuk menjadi Gubernur Jakarta atau presiden, dan Anda bukan muslim, sebaiknya jangan dulu lakukan rencana itu. Begitu juga seorang muslim tidak perlu berpikir menjadi Gubernur NTT.

Dalam masyarakat demokratis, tentu saja faktor agama bisa saja tetap berperan. Tapi ada identitas politik lain yang lebih menentukan. Kita lihat contoh London, Inggris. Walikota London adalah Sadiq Khan, seorang muslim keturunan Pakistan. Jadi, dia adalah seorang muslim yang dipilih mayoritas warga non-muslim. Dalam hal ini, yang berkontribusi bagi kemenangan Khan adalah fakta bahwa dia adalah pengurus dan aktivis Partai Buruh di London. Sebagai politisi, Khan berhasil menguatkan Partai Buruh. Jadi, di sana berlangsung transformasi dari identitas primordial menjadi identitas politik. Para pendukung Partai Buruh mengabaikan soal agama. Yang penting dia aktivis Buruh yang baik, maka dia dipilih.

Di Indonesia, transformasi ini belum terjadi. Apalagi identitas politik partai memang tidak jelas. Identitas politik partai itu mengawang, abstrak, tidak jelas. Misalnya, apa bedanya PDIP, Golkar, dan Demokrat? Kan tidak ada bedanya. Akhirnya, agama lagi yang menjadi penentu. Urusannya lebih konkrit, masuk surga atau neraka. Kalau di London, orang bangga menjadi Buruh, bangga menjadi konservatif, dan sebagainya. Di Amerika, orang bangga menjadi Demokrat atau Republic. Di Indonesia orang tidak punya ikatan dengan identitas partai politik. Kalau ditanya, Anda Partainya apa? Jawabnya malu-malu. Pembangunan partai politik di Indonesia gagal. Akibatnya gagal mentransformasikan identitas primordial ke dalam identitas politik.

Jadi, efeknya dalam jangka pendek sekarang di Indonesia masih berat. Di Sumatra Utara, calon wakil gubernur non-muslim saja ditolak. Tapi ada satu hal yang mungkin bisa memberi keseimbangan bagi aspek intoleransi, yaitu aspek integritas yang kuat. Saya membuat studi eksperimental tentang efek mana yang paling kuat: identitas, integritas, kompetensi, dan sebagainya, yang bisa menurunkan efek primordial. Ternyata yang bisa menurunkan efek primordial adalah integritas, bukan kompetensi. Artinya, muslim yang memilih Ahok adalah muslim yang memandang tinggi aspek integritas pemimpin. Jadi, sederhananya, muslim yang memilih Ahok adalah muslim yang mengatakan, tidak peduli apakah orang itu makan babi, tapi kalau dia punya integritas dalam memimpin, saya akan pilih dia.

Apakah ini teruji di tingkat nasional? Tidak, karena memang tidak ada kasusnya. Jadi, kalau seolah-olah agama tidak penting dalam pilpres, itu karena memang belum pernah ada capres non-muslim. Capres kita muslim semua dan Jawa semua. Yang non-Jawa, seperti Hamzah Haz dan Yusuf Kalla, kalah. Jadi, belum teruji.

Soal *right-wing populism*, data kami menunjukkan bahwa semangat populisme di Indonesia cukup kuat. Kalau di Jerman dan di Amerika Serikat, namanya *White Supremacy*, kalau di Indonesia mungkin namanya *Muslim Supremacy*. Jadi ini adalah kumpulan orang-orang yang menganggap orang Islam lebih hebat dari orang bukan Islam. Ini kuat di Indonesia dan sebenarnya menjadi gejala umum di dunia. Identitasnya saja yang berbeda-beda. Kalau di Eropa, yang kuat adalah supremasi ras; di Indonesia, supremasi agama. Ini menjadi mengganggu karena menghilangkan aspek-aspek rasional. Yang ditonjolkan adalah identitas. Dalam pemilu kita yang terakhir, unsur itu sangat kuat. Hanya saja bisa dicegah karena identitas kedua kontesannya sejenis: sama-sama Islam dan sama-sama Jawa. Islamnya juga kurang lebih sama. Tidak ada yang bisa klaim lebih Islam dari yang lain. Itu yang relatif membantu sehingga isu agama tidak terlalu menonjol. Coba kalau berbeda, ceritanya mungkin agak berbeda.

Kedua, soal siapa yang paling berkontribusi bagi penurunan demokrasi? Saya lebih senang menjawab, apa yang harus dilakukan untuk menjaga demokrasi?

Pertama-tama, seperti saya katakan, faktor kepemimpinan menentukan. Kita harus memilih pemimpin-pemimpin yang berkomitmen terhadap kesetaraan warga. Itu mendasar. Pemimpin penting karena dialah yang akan berkesempatan untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan.

Kedua, lihat aturan dan kebijakan yang ada. Ada tidak di dalamnya unsur yang anti demokrasi. Cek satu per satu aturan-aturan yang ada. Misalnya, rencana UU Terorisme. Di situ, dikatakan tentara akan terlibat lagi dalam mengurus masalah-masalah keamanan di dalam negeri. Ini harus diluruskan. Begitu juga soal UU Penodaan Agama. Ini terus menjadi masalah. Mahkamah Konstitusi pun menolak membatalkannya, mungkin karena takut justru akan dituduh mendukung penistaan agama. Akibatnya orang yang mengkritik tafsir agama atau yang punya pendapat lain mengenai tafsir agama bisa diperkarakan. Juga aturan yang menetapkan bahwa di Indonesia hanya ada enam agama yang diakui, tanpa mengakui Yahudi. Atau soal hak hidup kaum ateis dan LGBT. Aturan-aturannya harus ditinjau-ulang.

Bahkan sekarang muncul perda-perda Syariah. Yang membuat aturan-aturan itu adalah anggota parlemen yang dari partai nasionalis. Bukan Partai agama. Pelopornya PDIP, Golkar, dan Demokrat. Mereka mengeluarkan itu karena takut tidak terpilih lagi. Jadi soal efek elektoral. Padahal dalam sejarah, orang-orang konservatif itu tidak akan memilih partai lain kecuali partainya sendiri. Dan itu jumlahnya tidak besar. PKS sekarang kelihatan naik, tapi pada saat yang sama PPP hancur. Ya di situ-situ saja.

Karena itu kita mungkin bisa berharap agar Pak Jokowi bisa lebih tegas soal yang mendasar ini. Dia sekarang sudah tidak punya beban elektoral. Jadi, dalam kurun 2019-2024 dia kita harapkan bisa punya komitmen lebih tegas terhadap soal kesetaraan antar warga dan *rule of law*.

Terakhir, soal penangkapan pura-pura, ya memang kesannya begitu. Mungkin memang benar bahwa sebenarnya ini hanya untuk menimbulkan efek sementara. Main-main. Tapi menurut saya, dalam konteks demokrasi, ada sesuatu yang lebih mendasar. Menurut saya memang seharusnya tidak perlu tindakan hukum keras untuk membungkam orang seperti Ahmad Dhani yang mengatakan orang lain

'bego' atau 'idiot'. Itu seharusnya menjadi hal biasa saja dalam demokrasi. Di Amerika Serikat, penghinaan terhadap Donald Trump luar biasa. Tapi tetap dibiarkan. Seharusnya memang begitu. Tapi barangkali kelas demokrasi memang baru sejauh itu. Ya kita harus perbaiki, kita harus buat lebih maju.

MP:

Tidak ada jawaban sederhana tentang siapa yang paling berkontribusi bagi kualitas demokrasi kita. Tapi ada satu hal yang harus kita sadari. Kita memasuki reformasi tanpa pergantian rezim. Tanpa koreksi mendasar terhadap Orde Baru, sehingga salah-benar itu tidak jelas. Akibatnya kerancuan merajalela, distorsi merajalela, kebingungan merajalela. Masalahnya, tidak ada koreksi mendasar pada Orde Baru. Efeknya terasa sampai sekarang.

Lihat saja, anak-anak Soeharto masih berkuasa. Seperti bilang pada masyarakat: "Kalian mau apa?" Jadi ukuran salah-benar tidak jelas. Ada kepala daerah yang tertangkap korupsi, malah ketawa-ketawa di depan kamera. Dan ini terjadi karena kita tidak mau membongkar dan membayar apa yang sudah dilakukan Orde Baru selama puluhan tahun. Kata orang Inggris, *no pain no gain*. Kita tidak mau menjalani bagian yang sakit itu. Akibatnya, kita lanjutkan saja apa yang sudah berlangsung di masa Orde Baru. Orang-orang Orde Baru kita biarkan bertahan. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi itu yang terjadi. Irasionalitas politik kita tebal sekali.

Yang kita bisa lakukan sekarang adalah sesuatu yang *incremental*. Perubahan secara perlahan-lahan. Apa yang dikerjakan Bung Saiful dan SMRC adalah stau hal yang mulia. Satu demi satu aspek demokrasi disoroti agar kita menyadarinya.

Ketika reformasi mulai bergulir, saya sudah sampaikan pada teman-teman: peliharalah napas panjang karena pertarungan kita masih akan panjang. Ini tarik tambang yang panjang antara barisan reformasi dengan barisan Orde Baru. Sampai sekarang masih berlangsung. Mudah-mudahan Bung Saiful dan kawan-kawan masih berusia panjang. Sampai 90 tahun begitu. Amin.

Soal opisis dan rekonsiliasi, saya malah sependapat dengan orang-orang alumni 212 yang menyatakan tidak ikut bergabung. Mereka bilang: kami tetap tidak setuju, kami tidak ikut, kami tetap di bawah. Sebagian pihak menganggap, ini sudah selesai kok. Saya akan bilang, nanti dulu. Barangkali secara simbolis di kalangan elit sudah berdamai. Tapi di bawah belum tentu. PKS pasti masih akan melanjutkan perjuangan.

AMG:

Kadang saya agak khawatir bahwa bahwa penggunaan istilah toleransi *overuse* ya. Apakah kalau mayoritas muslim menyatakan memilih Anies, mereka menjadi tidak toleran? Saya rasa kita harus lebih hati-hati menggunakan tolok ukur soal toleransi. Misalnya, apakah toleransi itu harus berarti kita melakukan *enthusiastic embrace*, rangkulan antusias atau rangkulan bergairah, terhadap seseorang yang berbeda dengan kita. Kalau itu definisinya, mungkin kita tidak akan pernah sampai ke sana.

Jerman, misalnya. Mereka sudah terbiasa menghadapi orang-orang Turki yang sudah tiga generasi berada di sana. Tapi orang-orang Turki ini tetap melahirkan anak-anak perempuan yang kemudian berkerudung. Sehingga banyak orang Jerman menganggap pendidikan multikultural gagal karena

masyarakat Turki tetap bertahan dalam budaya mereka. Jadi, kita harus sadar bahwa memang dalam sejumlah hal, konsesus tentang nilai itu tidak bisa tercapai. Mungkin kita tidak pernah akan mencapai kesamaan nilai. Karena itu kita tidak bisa memaksakan *enthusiastic embrace* tersebut. Ada nilai-nilai yang universal, misalnya perdamaian, keadilan dan sebagainya. Tapi ada juga nilai-nilai yang saling tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya kelompok lain. Lihat saja orang Palestina dan Israel. Keduanya menuntut perdamaian dan keadilan. Tapi orang Palestina akan bilang, keadilan dulu baru perdamaian. Sementara orang Israel akan bilang: perdamaian dulu, baru keadilan. Jadi tidak akan pernah ketemu. Bahkan nilai-nilai universal pun bisa didefinisikan dengan cara berbeda-beda.

Karena itu, dalam pandangan saya, bisa jadi yang terpenting adalah bukanlah konsensus nilai-nilai, melainkan bisakah kita hidup bersama? Memaksakan agar kita bersepakat menerima nilai-nilai yang sama mungkin adalah harapan berlebihan. Itu soal serius yang harus kita pikirkan. Termasuk memikirkan terjemahannya ke dalam kebijakan seperti apa.

Perbedaan saya dengan Pak Saiful itu mungkin begini. Pak Saiful itu idealis. *Benchmark* toleransi dan demokrasi yang dia gunakan idealis. Sehingga tinggi sekali. Saya khawatir itu tidak akan bisa atau sulit sekali tercapai. Sementara saya berusaha lebih realistis, dengan mencari konsensus yang bisa disepakati bersama.

Sekarang saya pindah ke soal *rightwing populism*. Yang jadi masalah adalah basis mereka bukan ide, tapi cuma identitas. *White supremacy* itu kan menonjolkan keunggulan kulit putih. Kalau basisnya itu memang repot sekali. Tadi saya bicara soal ketidakpuasan demokrasi (*democratic discontent*). Itu bicara soal hal-hal yang dihadapi masyarakat sehari-hari: listrik mati, jalan rusak, ke dokter susah, pendidikan susah. Itu yang menjadi sumber ketidakpuasan terhadap pemerintah yang menjalankan demokrasi. Tapi itu biasa-biasa saja sebenarnya. Yang jadi masalah adalah kalau ketidakpuasan masyarakat ini bertemu dengan demagog yang menterjemahkan kekecewaan masyarakat itu menjadi *primordial discontent*. Dan itulah yang dilakukan para demagog. Mereka menterjemahkan ketidakpuasan itu terhadap ketakutan terhadap para imigran yang digambarkan sebagai penyebab persoalan.

Coba kita lihat di Amerika. Kota atau masyarakat yang paling anti imigran dan orang asing justru adalah daerah yang tidak ada imigrannya. Seperti di daerah North West; di sana kan banyak imigran dan justru di daerah itu saya tidak menemukan sikap anti orang asing. Orang-orang Amerika di sana justru senang dengan kehadiran orang asing. Mereka malah senang dengan makanannya, dengan tari-tariannya.

Karena itu salah satu yang paling berbahaya menurut saya adalah kalau ada pihak-pihak yang berhasil mentransformasikan *democratic discontent* menjadi *primordial discontent*. Ini yang akan menjadi ancaman sesungguhnya bagi demokrasi.

Seperti dikatakan Clifford Geertz: "*Primordial discontent* menghujam jauh lebih dalam dan jauh lebih sulit diatasi. Sebuah ketidakpuasan primordial yang mendalam, bukan saja akan menghabisi kepala Soekarno, Nehru, atau Moulay Hasan; itu akan menghabisi Indonesia, India, atau Maroko." (*Primordial discontent strives more deeply and is satisfied less easily. If severe enough, it wants not just Soekarno's or Nehru's or Moulay Hasan's head, it wants Indonesia's or India's or Morocco's.*)

Kalau sekarang kita masukkan kata 'demokrasi', maka kita akan mengatakan bahwa kalangan yang bergerak dengan ketidakpuasan primordial ini bukan hanya ingin mengganti pemerintah dengan pemerintah yang memenuhi hak-hak sipil dan kesejahteraan, tapi ingin mengganti demokrasi itu sendiri.

Mereka akan terus menggugat demokrasi. Seorang penulis yang kalau tidak salah adalah anggota Hizbut Tahrir, menulis buku dengan judul: "Buanglah demokrasi Pada Tempatnya."

Ini yang menjadi tantangan besar kita. Bagaimana kita membuat masyarakat kita bersikap rasional dan tidak mudah terjebak dalam politik identitas yang akan dimanfaatkan para demagog. Saya percaya publik Indonesia bisa rasional dan sama rasionalnya dengan pemilih di Amerika. Karena itu kita membutuhkan institusi politik yang inklusif dan tidak ekstraktif tadi. Salah satu lembaga yang bisa diharapkan membangun itu adalah partai politik. Partai politik yang bisa mengajarkan masyarakat tentang memilih para kandidat secara rasional. Kalau partai politik tidak bisa menjadi tempat di mana masyarakat bisa belajar dan mengambil jalan pintas untuk memahami pilihan-pilihan politik, masyarakat akan berpaling pada pihak lain. Dan sumber lain yang paling kuat itu adalah agama. Tidak berperannya partai politik inilah yang akan dimanfaatkan para demagog. Partai politiklah yang mengirimkan orang ke DPR dan kalau anggota DPR ternyata memble, jangan disalahkan kalau masyarakat kehilangan kepercayaan akan demokrasi. []